KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Semua Fraksi di DPR "Ceroboh"
Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 4

Semua Fraksi di DPR 'Ceroboh'

Istana Ikut Bereaksi soal RUU Ketahanan Keluarga

JAKARTA–Seluruh fraksi yang ada di DPR RI bisa dikatakan sangat ceroboh. Sejatinya, mereka telah memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang saat ini menjadi kontroversi, masuk ke dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, walaupun RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima anggota DPR lintas fraksi, namun semua fraksi telah menyetujui masuk dalam pembahasan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

"Artinya, ya ceroboh, kalau sekarang ada fraksi yang mempertanyakan, ya kita kembali mempertanyakan, waktu itu kenapa ikut menyetujui," ujarnya kepada INDOPOS di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/2).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, dalam tahap pembahasan Prolegnas Prioritas di Baleg, pihaknya sudah meminta agar RUU Ketahanan Keluarga diharmonisasikan dengan dua RUU lain, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dan RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional. Namun, pengusul tetap bersikukuh agar RUU tersebut tetap diajukan sendiri.

"Para pengusul bersikukuh bahwa RUU ini diajukan masing-masing, dan sudah kita mintakan pendapat akhir fraksi, tidak ada yang menolak. Semua setuju terhadap Prolegnas Prioritas yang jumlahnya 50 itu," terangnya.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, alasan sejumlah fraksi kecolongan terhadap isi dari RUU Ketahanan Keluarga karena saat pengusulan, draf RUU tersebut belum diserahkan secara resmi. Saat itu, pengusul hanya menyampaikan judul serta naskah akademik dari RUU tersebut.

"Kita tak menyentuh pada substansi draf RUU nya, karena draf RUU-nya baru disampaikan para pengusul saat kemudian. Di antaranya misal para pengusul menganggap perlu bahwa saat ini waktunya mempresentasikannya ke Baleg," ujarnya.

Namun, melihat banyaknya protes dari berbagai pihak terkait isi dari RUU Ketahanan Keluarga, ia melihat adanya peluang bahwa RUU tersebut tidak akan dilanjutkan pembahasannya. Sebab, sejumlah fraksi pun sudah menyatakan menolak usulan tersebut.

"Karena sudah menimbulkan penolakan-penolakan, bahkan ada beberapa fraksi yang tidak mengetahui anggotanya menjadi pengusul. Itu sebenarnya menurut kami apologi saja," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebagian besar anggota fraksinya tidak mendukung RUU Ketahanan Keluarga. Ia menegaskan, Fraksi Gerindra tidak pernah mengusulkan RUU tersebut.

"Sebagian besar sudah menyatakan tidak mendukung, tapi secara fraksi nanti akan diputuskan," kata Dasco kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/2).

Dia mengatakan, Gerindra terlebih dahulu akan meminta klarifikasi dari kader partai yang mengusung RUU tersebut. RUU tersebut bukan inisiatif fraksi partai melainkan diusulkan secara pribadi oleh anggota DPR dari Partai Gerindra, Sodik Mudjahid.

"Sehingga pada saat ini kami tidak bisa menyatakan mencabut dukungan apa pun karena kami tidak pernah menjadi pengusul secara fraksi," katanya.

Dasco mengungkapkan, Gerindra rencananya akan memanggil Sodik guna meminta klarifikasi terkait usulan RUU tersebut. Ia mengakui bahwa RUU itu setelah dipantau lebih lanjut memang menuai kontroversi dalam beberapa hari belakangan.

Menurutnya, kontroversi dapat terpantau dari ramainya pendapat yang masuk ke DPR maupun media dan media sosial. Keberadaan RUU itu akan menjadi perhatian besar bagi Gerindra sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan konstitusi yang dimaksud.

Sementara itu, Endang Maria Astuti, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu pengusul menyatakan menarik diri dari pengusul RUU Ketahanan Keluarga. Ia mengaku, rancangan regulasi itu merupakan usulannya secara pribadi bersama empat anggota di DPR RI lainnya.

"Sebetulnya itu usulan pribadi dan memang sudah ditarik," kata Endang kepada INDOPOS, kemarin.

Dia menjelaskan, ide dasar pengusulan RUU Ketahanan Keluarga adalah kasus narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) serta kekerasan seksual yang meningkat di tengah masyarakat.

Endang juga mengaku rancangan regulasi itu merupakan bentuk keprihatinannya melihat perilaku anak-anak di usia sekolah, dari SD hingga SMA yang telah menjurus ke arah seks bebas.

"Perilaku anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah mengarah ke seks bebas dan tiba-tiba anak SMP melahirkan tanpa dia tahu sudah hamil. Itu sangat memprihatinkan pribadi saya," ucapnya.

Dia melanjutkan, cara pencegahan terbaik terhadap berbagai hal itu adalah melalui keluarga. Menurutnya, kondisi keluarga yang rapuh berpotensi membuat anak-anak terjerumus dalam narkoba hingga seks bebas.

"Kami berharap solusi utamanya pencegahan yang paling baik harus dari keluarga. Jika keluarga rapuh, yang terjadi seperti saya uraikan di atas," ucap Endang.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menilai, RUU Ketahanan Keluarga usulan DPR terlalu menyentuh ranah pribadi. RUU ini diketahui dihujani kritik di media sosial dan menjadi kontroversi.

"Saya enggak tahu sih, tapi katanya ada pasal yang mewajibkan anak laki-laki perempuan pisah kamar. Terlalu menyentuh ranah pribadi," ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet Jakarta, Jumat (21/2).

DPR akan memasukkan draf RUU Ketahanan Keluarga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dini menyebut pemerintah akan menyampaikan pendapat mengapa RUU ini mengurusi urusan privat rumah tangga.

"Setiap undang-undang kan pasti ada pembahasan juga sama pemerintah kan. Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitunya negara masuk ke ranah privat. Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional," jelasnya.

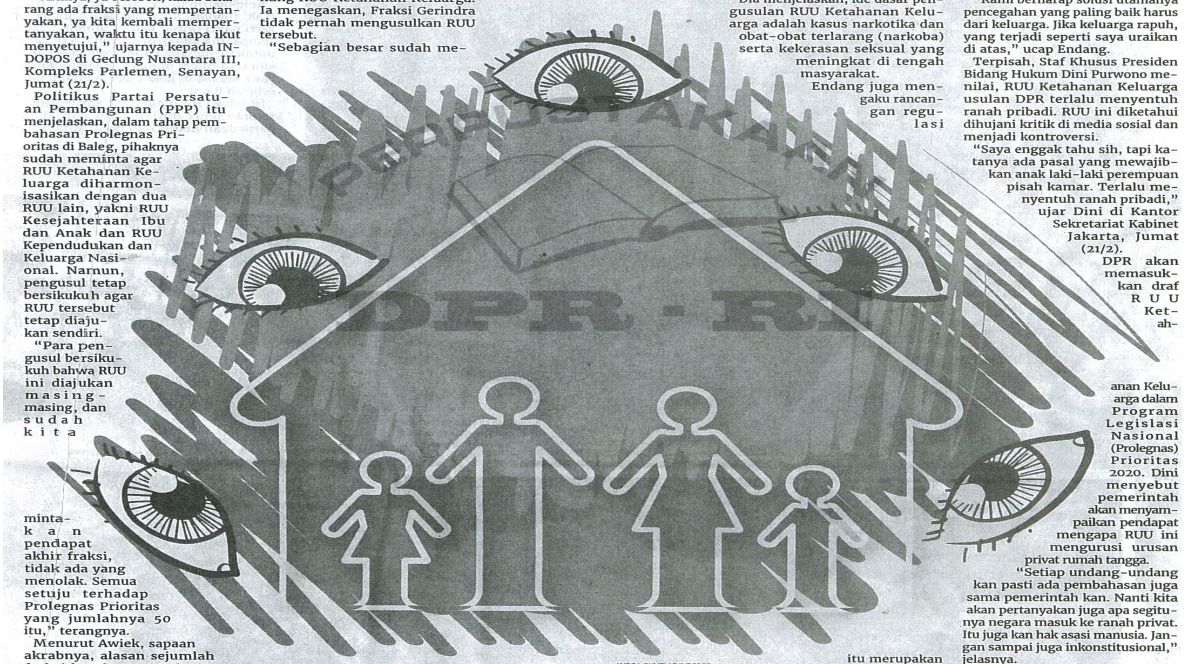
Dini menuturkan, hingga kini pemerintah belum menerima draf RUU Ketahanan Keluarga dari DPR. Dalam pembahasannya, dia berharap agar RUU tersebut tak melanggar hak asasi manusia.

"Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah," kata Dini. **(aen)**

> 66
> Artinya, ya ceroboh, kalau sekarang ada fraksi yang mempertanyakan, ya kita kembali mempertanyakan, waktu itu kenapa ikut menyetujui.
> ***Achmad Baidowi***
> *Wakil Ketua Baleg DPR RI*



CHARLIE/INDOPOS



ANGGA GUMELAR/INDOPOS